

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok mengalami kekurangan baik barang maupun pelayanan yang diperlukan dalam mencapai standar hidup layak dimana standar hidup layak bersifat subjektif dan berbeda-beda di setiap tempat dan waktu Levitan (1996). Kemiskinan juga merupakan sebuah kondisi saat seseorang tidak bisa menikmati pilihan dan kesempatannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain World Bank (2015). Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dalam memberantas kemiskinan, hal ini juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Perhatian khusus dari pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk program-program untuk menekan angka kemiskinan salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Murah (2016) dalam artikelnya yang berjudul Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang didalamnya merupakan kegiatan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Di sisi lain, RTSM

harus memenuhi persyaratan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pemenuhan beberapa komitmen oleh RTSM, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini menjadi satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Selain itu tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*) akan dicapai lebih cepat jika program ini terus berlanjut. dengan syarat mereka memenuhi.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial padaa laman resmi Kemeterian sosial yaitu kemensos.id yang diakses pada 20 Februari 2024 menjelaskan lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang didirikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007 silam. Program ini diharapkan dapat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kemandirian ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga yang memenuhi syarat tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, dan orang tua. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga harus memenuhi indikator-indikator tertentu, seperti indeks kemiskinan, kondisi pendidikan, dan kesehatan. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menerima bantuan keuangan dalam bentuk tunai secara berkala. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan akses keluarga penerima terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi. Pada tahun 2023, Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Jumlah penerima Program Keluarga Harapan terus naik setiap tahunnya dibuktikan dari anggaran pemerintah yang terus naik setiap tahunnya menyesuaikan jumlah penerima program. Hal ini didukung oleh Artamevia dan Sukmana (2022) pada artikel mereka yang berjudul *Analysis of the Family Hope Program: Analisis Program Keluarga Harapan* yang menyatakan bahwa jumlah penerima PKH pada tahun 2018 anggaran pada bantuan PKH sebesar 17,5 triliun, tahun 2019 sebesar 32,65 triliun, dan di tahun 2020 anggran PKH yang dikeluarkan sebesar 37,4 triliun.

Mereka juga menyatakan bahwa anggaran dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah penerimanya, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima PKH dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan salah satunya dikarenakan perluasan jangkauan program PKH. Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program PKH agar lebih banyak masyarakat miskin dan rentan yang dapat terbantu. Salah satu upaya pemerintah seperti yang ditulis oleh Setiawan (2020) dalam laman Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara dengan menggandeng Kementerian Kesehatan memperluas kategori penerima bantuan sosial pada penyakit TBC. Seain memperluas kategori juga terdapat perluasan cakupan yang dilakukan oleh pemerintah. Cakupan wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya sudah mulai mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, namun terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau program ini. Daerah yang belum terjangkau PKH umumnya adalah daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses,

ketersediaan data, ketersediaan SDM, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Maka dari itu pemerintah selalu mengusahakan dalam memperluas cakupan terutama dari daerah.

Siaran pers Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 7 November 2023 yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Sosial (2023) yaitu kemensos.go.id menyatakan bahwa penyaluran PKH telah mencapai 98,20% di seluruh Indonesia. Bantuan Program Keluarga Harapan disalurkan di 34 provinsi di Indonesia, terutama Jawa Barat. Menurut data salah satu laman berita indonesia CNN Indonesia yang diakses pada 26 Februari 2024, Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati urutan kedua sebagai provinsi dengan penduduk miskin terbanyak setelah Jawa Timur. Jawa Barat memiliki 3,88 juta penduduk miskin. Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam kemensos.go.id juga menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak yaitu sebanyak 3.646.244 Keluarga Penerima Manfaat.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk Indonesia terutama di Jawa Barat yang belum lepas dari kemiskinan dan masih bergantung pada bantuan sosial. Menurut Mohammad Teja (2023) dalam artikel Pentingnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat , ketergantungan pada bantuan sosial tersebut dapat menghambat pergerakan kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Hal tersebut juga yang menghambat penekanan angka kemiskinan *extrim* di Indonesia untuk mencapai angka 0% dikarenakan bantuan sosial tidak membangun kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Ghifari, Hanif Reyhan (2023) dalam laman berita

nasional tirto.id menggambarkan dan menuangkan pendapatnya mengenai fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang memicu masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Dalam laman berita tersebut memuat sulitnya masyarakat keluar dari kemiskinan dalam kaitannya dengan pemberian bantuan sosial adalah masyarakat kurang memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Saat diberikan bantuan sosial masyarakat kurang terpacu untuk mengembangkan kemampuan atau *skill* dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kurangnya kemampuan atau *skill* dalam mengembangkan diri tersebut juga berpengaruh besar pada kemandirian sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial. Ketergantungan masyarakat dengan bantuan sosial saat ini menjadi fokus utama pemerintah. Dalam mendorong kemandirian masyarakat pemerintah mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kemampuan masyarakat melalui potensi yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah pariwisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2022 sektor pariwisata menyumbang Rp 289,8 triliun terhadap PDB Indonesia atau setara dengan 4,97%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada sektor ekonomi pariwisata juga mempunyai dampak baik bagi perekonomian pada masyarakat sekitar daerah wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor padat karya, yang berarti sektor ini mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Pada tahun 2022, sektor pariwisata menyerap 13,6 juta tenaga kerja, atau setara

dengan 10,73% dari total tenaga kerja di Indonesia. Tingginya minat wisata di Indonesia akan mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja, baik di sektor formal maupun informal. Perputaran roda ekonomi yang cepat di sektor pariwisata memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi masyarakat di sekitar daerah wisata. Tumbuhnya sektor ekonomi atau usaha pada kegiatan pariwisata disebut juga industri pariwisata. Menurut Damarjadi dalam Putri (2007) menyatakan bahwa industri pariwisata merupakan sebuah rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang bersama-sama menghasilkan produk, jasa, maupun layanan, yang akan mendorong kegiatan wisatawan baik langsung maupun tidak langsung selama berwisata.

Hal tersebut dapat mendorong masyarakat sekitar daerah wisata untuk terlibat dalam industri pariwisata. Dalam industri pariwisata masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan wisata, seperti membuka usaha kuliner, menyediakan jasa penginapan, menjual souvenir, dan menjadi pemandu wisata. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat setempat terutama PMKS disekitar daerah wisata. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, sektor pariwisata dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah wisata. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam garis kemiskinan akan memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan terlibat dalam kegiatan wisata. Dari hal tersebut dapat disimpulkan sektor pariwisata adalah sektor yang paling menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari dampak positif tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong penciptaan destinasi wisata baru dengan penciptaan

kampung wisata sejak tahun 2016. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya Program Kampung Wisata oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun tersebut. Program Kampung Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi wisata di desa. Program ini memberikan bantuan dana dan pendampingan kepada desa-desa yang memiliki potensi wisata untuk mengembangkan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan kampung wisata. Sejak diluncurkan, Program Kampung Wisata telah menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2023, terdapat lebih dari 3.000 kampung wisata yang telah dikembangkan di seluruh Indonesia. Pemerintah terus mendorong pengembangan kampung wisata melalui berbagai program dan kebijakan. Pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan Program Desa Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing kampung wisata di Indonesia. Program tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam implementasinya.

Menurut laman berita [pupr.bisnis.com](http://pupr.bisnis.com) (2021) terdapat kampung wisata yang terbentuk dari program kampung wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) adalah Kampung Rajut Binong Jati. Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati merupakan salah satu kampung wisata kreatif di Kota Bandung. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung Kampung Wisata Rajut Binong Jati mempunyai 8.315 rumah tangga pada tahun 2023. Menurut Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung kampung rajut ini merupakan sentra rajut terbesar di Bandung dan sering menjadi rujukan wisata. Kampung Rajut Binong

Jati telah berdiri sejak tahun 1970-an, yang diresmikan menjadi Kampung Wisata Kreatif pada bulan Oktober 2022.

Awal mulanya, kampung ini hanya dihuni oleh beberapa keluarga yang merajut pakaian sebagai usaha sampingan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar dan bekerja di bidang rajut, sehingga kampung ini berkembang menjadi sentra rajut terbesar di Bandung. Menurut Penelitian Pariwisata Rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPPDA (2022) saat ini, terdapat lebih dari 400 rumah tangga dan 418 UMKM di Kampung Rajut Binong Jati yang terlibat dalam industri rajutan. Jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan sekitar 2,4% rumah tangga menjadi pengrajin. Mereka memproduksi berbagai macam produk rajutan, seperti pakaian, aksesoris, dan mainan.

Produk-produk ini dijual ke berbagai daerah di Indonesia dan bahkan diekspor ke luar negeri. Jumlah ini terus berkembang seiring dengan semakin populernya produk rajutan dari Binong Jati. Masyarakat kampung rajut tersebut banyak yang menggantungkan kehidupan mereka pada sektor rajut. Di sisi lain masih banyak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Binong. Menurut data dari Open Data Kota Bandung yang diakses pada 10 Juni 2024 didukung oleh data pendamping Program Keluarga Harapan beserta data pendukung lainnya terdapat 1.221 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dari di Kelurahan Binong (2023). Mayoritas dari keluarga tersebut turut menggantungkan kehidupan mereka pada sektor rajut untuk mendapatkan penghidupan. Dari gambaran tersebut Kampung Wisata di Kampung Wisata Kreatif

Rajut Binong Jati memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat terutama Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam hal ekonomi dan perbaikan sosial, dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari penjelasan yang termuat dapat dilihat bahwa kondisi wisata dan kondisi kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat. Kondisi sosial ekonomi pada masyarakat Kampung Wisata Kreatif tersebut nantinya akan dimuat menjadi inti utama dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, istilah "sosial ekonomi" mengacu pada studi tentang bagaimana faktor-faktor sosial, seperti budaya, nilai, norma, dan struktur sosial berinteraksi dengan faktor-faktor ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan dan sumber daya. Seperti yang dijelaskan oleh Abdulsyani (2013), keberadaan desa wisata dapat mempengaruhi tatanan kondisi sosial dan ekonomi di dalam masyarakat desa. Menurut Max Weber (1947) sosial ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tindakan manusia yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan diarahkan oleh makna subjektif. Fokus utama studi sosial ekonomi Weber adalah tindakan manusia. Tindakan manusia ini bukan hanya gerakan fisik; itu memiliki makna dan tujuan. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik adalah fokus tindakan manusia. Ini dapat berupa kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, atau kebutuhan yang lebih tinggi, seperti pendidikan dan penghargaan sosial. Selain kebutuhan, makna subjektif mendorong tindakan manusia. Maksudnya adalah cara seseorang menginterpretasikan keadaan masyarakat pada umumnya. Makna ini dapat berbeda dari orang ke orang dan mungkin berubah seiring waktu.

Soerjono Sukanto (2010) mengemukakan kondisi sosial adalah tempat dalam dalam bermasyarakat sehubungan dengan orang lain yang mencakup lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya. Lingkungan pergaulan yang dimaksud adalah kelompok sosial di mana seseorang berinteraksi dan menjalin hubungan, seperti keluarga, teman sebaya, komunitas, dan organisasi; prestasi dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian atau hasil yang diperoleh seseorang dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial; sedangkan hak-hak dan kewajiban dimaksud sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.

Hak adalah hal yang berhak diterima individu dari masyarakat, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan individu untuk masyarakat. Kondisi ekonomi menurut Abdulsyani dalam Nurhayati (2017), didefinisikan sebagai kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia, yang ditentukan oleh pendapatan, aktifitas ekonomi, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Dari pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan keterkaitan antara kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan individu/kelompok. Soejono Soekanto (2017) membagi kondisi sosial ekonomi dilihat dari kelas sosial menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari kelas atas yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang tinggi; Kelas menengah yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang menengah; dan kelas bawah yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang rendah.

Dalam mengukur kondisi sosial dan kondisi ekonomi mempunyai indikator yang digunakan. Kondisi sosial menurut Soerjono Soekanto (1982) memiliki beberapa indikator untuk mengukur kondisi sosial keluarga yaitu kekayaan, ukuran pendidikan, kondisi pekerjaan dan keterlibatan terhadap peran kemasyarakatan. Soerjono Soekanto menekankan keterkaitan antara sub-sub indikator tersebut dimana indikator yang dirumuskan menjelaskan teori sosial oleh Robert K Merton yaitu "*theories of the middle range*". Abdulsyani dalam Ramadhanti, Mulyadi, dan Razati (2016) menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur status sosial ekonomi adalah kondisi pendidikan, kondisi pendapatan, dan kondisi pekerjaan. Sedangkan Yuliati dalam Ramadhanti, Mulyadi, dan Razati (2016) menjabarkan dan menambahkan mengenai indikator sosial ekonomi menurut Abdulsyani yaitu mengenai perumahan, dan kesejahteraan rumah tangga. Dilihat dari indikator-indikator sosial dan ekonomi baik dari Soerjono Soekanto, Abdulsyani maupun Yuliati terdapat keterkaitan antara kondisi sosial dan kondisi ekonomi kondisi sosial juga memuat kekayaan dimana kekayaan juga merupakan dasar indikator kondisi ekonomi. Dapat dilihat bahwa ternyata kondisi sosial dan kondisi ekonomi memang saling terkait. Saat kondisi ekonomi baik kondisi sosial juga mendorong untuk mencapai taraf yang baik, begitu pula sebaliknya.

Keterkaitan antara sosial ekonomi, kampung wisata dan isu-isu mengenai masyarakat miskin penerima bantuan PKH diatas maka peneliti tertarik meneliti terkait sosial ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati. Keluarga Penerima

Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kelompok rentan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi penting untuk diteliti dikarenakan kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi keberfungsian sosial maupun kesejahteraan mereka. Kondisi sosial ekonomi juga akan mengambil peran penting dalam menekan angka ketergantungan terhadap bantuan sosial dan menjadi salah satu solusi meningkatkan graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.”**

Penelitian ini mengambil dua indikator penelitian. Indikator dalam mengukur kondisi sosial masyarakat dan indikator dalam mengukur kondisi ekonomi. Kedua indikator tersebut didapatkan dari indikator kondisi sosial menurut Soerjono Soekanto (1982). Indikator ekonomi didapatkan dari indikator sosial ekonomi menurut Abdulsyani dalam Ramadhanti, Mulyadi, dan Razati (2016) dan Yulianti dalam Ramadhanti, Mulyadi, dan Razati (2016) yang nantinya akan digunakan hanya indikator ekonominya saja. Hal tersebut dikarenakan indikator-indikator tersebut saling melengkapi antar bagian di setiap teori rumusan indikator tersebut. Indikator-indikator tersebut dianggap cocok dan relevan digunakan dalam meneliti kondisi sosial ekonomi penerima manfaat program keluarga harapan di kampung wisata kreatif rajut binong jati. Relevansi tersebut dapat dilihat dari kesesuaian dengan variabel yang diteliti dan mempunyai literatur pendukung yang mempunyai kontribusi secara ilmiah. Mengacu pada indikator yang ada, pada penelitian ini

indikator akan disesuaikan sesuai dengan masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini kondisi sosial ekonomi tersebut akan diarahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Peneliti akan mengambil indikator dasar dari kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat.

Kondisi sosial diwakili oleh pendidikan dan keterlibatan terhadap kegiatan kemasyarakatan. Pada kondisi sosial, pendidikan merupakan hal dasar dalam Bergeraknya kondisi sosial masyarakat. Menurut Sorjono Soekanto (1982) pendidikan memberikan jalan untuk pekerjaan yang lebih baik dan memungkinkan tahan terhadap tekanan sosial dimana hal tersebut sangat berpengaruh dengan peningkatan kondisi sosial menjadi lebih baik. Pendidikan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan keterlibatan keluarga terhadap pendidikan anak pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Survey Sosial Ekonomi Kementerian Sosial 2017). Keterlibatan terhadap kegiatan kemasyarakatan merupakan salah satu unsur utama dalam mengukur kondisi sosial. Soerjono Soekanto (1982) menyatakan bahwa interaksi sosial terutama keterlibatan dengan masyarakat menimbulkan perangkat peranan yang menyangkut hubungan antar manusia. Saat hubungan dan peran masyarakat masyarakat berjalan dengan baik maka kondisi sosial akan terus berkembang. Kondisi sosial masyarakat yang dimaksud adalah kemampuan individu dalam bertahan dalam tekanan ataupun kondisi sosial lainnya. Pada penelitian ini keterlibatan terhadap kegiatan kemasyarakatan akan melihat partisipasi organisasi kemasyarakatan yang diikuti, hubungan keluarga dengan

masyarakat sekitar tempat tinggal, partisipasi dalam kegiatan nasional seperti pemilu (Survey Sosial Ekonomi Kementerian Sosial 2017). Selain itu juga untuk menekankan pada kemampuan individu untuk bertahan dalam tekanan maupun kondisi sosial lainnya peneliti akan melihat partisipasi masyarakat pada pemberian perlindungan sosial masyarakat oleh pemerintah.

Kondisi ekonomi diwakili oleh kondisi pekerjaan dan kondisi rumah tempat tinggal. Menurut sosial ekonomi menurut Abdulsyani dalam Ramadhanti, Mulyadi, dan Razati (2016) dan Yuliati dalam Ramadhanti, Mulyadi, dan Razati (2016) pekerjaan serta pendapatan dalam kondisi ekonomi sangat berpengaruh besar. Pekerjaan serta pendapatan berpengaruh pada pemenuhan kehidupan dasar individu/keluarga seperti sandang pangan dan papan. Selain itu pekerjaan juga meningkatkan kualitas hidup individu/keluarga dengan cara individu/keluarga dapat mengakses barang dan jasa yang lebih baik, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan lain sebagainya. Selain itu dengan pekerjaan individu atau keluarga dapat memiliki aset dan kepemilikan untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Dalam penelitian ini pada indikator pekerjaan akan meneliti mengenai jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan aset baik barang maupun jasa (Survey Sosial Ekonomi Kementerian Sosial 2017).

Kondisi perumahan/tempat tinggal merupakan bagian dari kebutuhan dasar, dikarenakan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan individu/keluarga. Saat kondisi perumahan/tempat tinggal layak dan nyaman maka kesehatan fisik maupun mental akan terpengaruh sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik. Selain itu keamanan keluarga juga akan terjamin dengan

rumah/tempat tinggal yang layak huni. Pada indikator ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah kondisi rumah secara fisik, rasa aman, dan kondisi psikologis atau konflik sosial pada keluarga maupun lingkungan (Survey Sosial Ekonomi Kementerian Sosial 2017).

Pada indikator rasa aman, kondisi psikologi dan konflik sosial secara lebih rinci dijabarkan menjadi bencana alam dan bencana sosial. Seperti pendapat Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniwan (2019) rumah yang baik adalah rumah yang tangguh bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi yang akan terpuruk ketika terjadinya bencana jika tidak ditanggulangi. Penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam metode kuantitatif deskriptif yang menggunakan data numerik untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau situasi. Data numerik ini dikumpulkan melalui berbagai cara yaitu kuesioner dan studi dokumentasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, disusunlah rumusan masalah utama dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung?” yang dijabarkan lagi menjadi sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Responden pada penelitian Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Mafaat Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati?

2. Bagaimana kondisi pendidikan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung?
3. Bagaimana keterlibatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan terhadap kegiatan kemasyarakatan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung?
4. Bagaimana kondisi pekerjaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung?
5. Bagaimana kondisi rumah tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, tujuan utama dalam penelitian yang telah diuraikan tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian. Berdasarkan tujuan utama tersebut, sub-sub tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Karakteristik informan pada penelitian Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati.

2. Kondisi pendidikan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
3. Keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
4. Kondisi pekerjaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
5. Kondisi rumah tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong Jati Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman pemahaman tentang konsep sosial ekonomi keluarga. Kondisi Sosial ekonomi keluarga terdiri atas kondisi pendidikan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, keterlibatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam kegiatan kemasyarakatan, kondisi pekerjaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan kondisi rumah tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Dalam perkembangan keilmuan praktik pekerjaan sosial, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial khususnya untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pekerja sosial dan praktisi dalam penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan perlu memperhatikan kondisi pendidikan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, keterlibatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam kegiatan kemasyarakatan, kondisi pekerjaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan kondisi rumah tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL**

Memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang jaminan sosial, tinjauan tentang efektivitas, tinjauan tentang program Bantuan Sosial Langsung Tunai Dana Desa, tinjauan tentang

pekerja sosial dengan kemiskinan, tinjauan tentang kemiskinan, dan kerangka pikir penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah – langkah penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan, serta identifikasi sumber.

**BAB V : USULAN PROGRAM**

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, langkah – langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, indikator keberhasilan program.

**BAB VI : PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian, serta saran yang ditujukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman program pemecah masalah.